



## PELATIHAN DASAR CALON PNS GOL III ANGKATAN XXXII TAHUN 2019

PUSDIKLAT BADAN PUSAT STATISTIK

# BIODATA

- Nama : **Daud Eliezar**
- Riwayat Pekerjaan : - BPS Provinsi Kalimantan Tengah (1996 – 2001)  
- Pusdiklat BPS (2002 – sekarang)
- Riwayat Pendidikan : - Akademi Ilmu Statistik (1996)  
- Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (2000)  
- Institut Teknologi Sepuluh Nopember (2010)
- Nomor HP : **081213748545**
- Alamat e-mail : **desinaga@bps.go.id**





## Tujuan Pembelajaran

### Deskripsi Singkat

Mata diklat ini memfasilitasi pembentukan nilai-nilai dasar anti korupsi pada peserta diklat prajabatan, disajikan berbasiskan Experiential learning ;

dengan penekanan pada proses internalisasi nilai-nilai dasar tersebut, melalui multi metode dan media ceramah interaktif, diskusi menonton film, studi kasus simulasi dan demonstrasi.

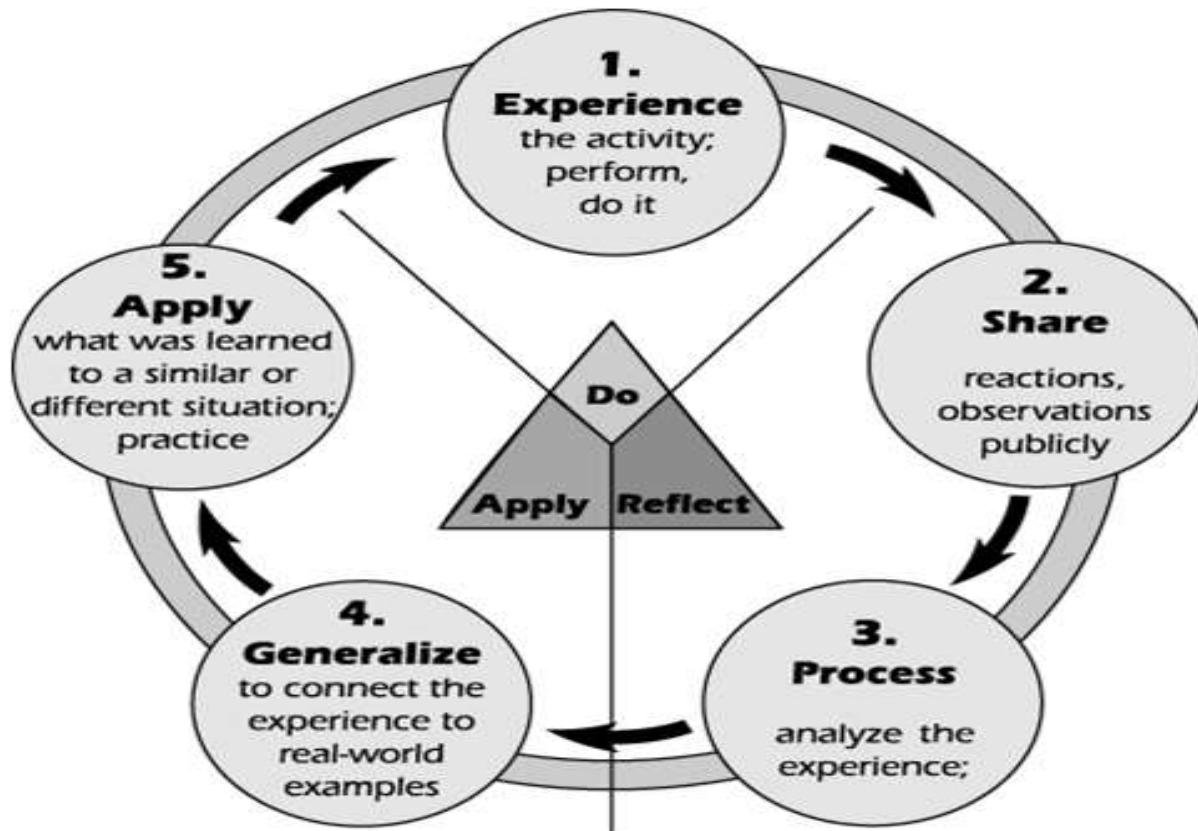
Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar anti korupsi dalam memimpin, mengelola jabatannya.

# Change Policy

(Kebijakan  
Rembahan)

Diklat  
Prajabatan

# Metode EXPERIENTIAL LEARNING



- Metode yang digunakan adalah experiential learning model, seperti konsep model Kolb (1984) dan Kurt Lewin, yang memiliki konsep model deskriptif untuk proses pembelajaran orang dewasa.

# Materi POKOK dan Sub Materi POKOK

## Modul I

### A. Sadar Anti Korupsi

- Dampak Perilaku dan Tindak Pidana Korupsi
- Pengertian Korupsi
- Tindak pidana Korupsi
- Niat, Semangat, Komitmen Anti Korupsi
- Indonesia Bebas Korupsi

## Modul II

### B. Semakin Jauh Dari Korupsi

- Tunas Integritas
- Identifikasi Nilai Dasar Anti Korupsi
- Penyelarasan Nilai Organisasi dan Anti Korupsi
- Penanaman Nilai Integritas
- Bangun Sistem Integritas



**Indonesia** bumi  
ciptaan Tuhan dengan keindahan dan kekayaan  
yang **luar biasa**



Pantai Terindah



Gas alam kualitas terbaik



Hutan terbaik



Tambang Emas Terbesar

Batu Bara Terbaik

Tanah yang Subur

# Berita Utang Indonesia

## April 2019, Utang Luar Negeri Indonesia Naik Jadi Rp 5.528 Triliun

Senin, 17 Juni 2019 | 12:08 WIB



JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan [Utang Luar Negeri \(ULN\)](#) Indonesia pada akhir April 2019 sebesar 389,3 miliar dollar AS atau sekitar Rp 5.528 triliun (kurs Rp 14.200 per dollar AS). ULN ini tumbuh lebih tinggi dibanding Maret

# detikfinance

Selasa, 19 Mar 2019 23:20 WIB

## Ini Dia Rincian Utang Pemerintah Rp 4.566 Triliun

- detikFinance



Foto: Rachman Haryanto

FOKUS BERITA

Utang RI Tembus Rp 4.000 Triliun

**Jakarta** - Hingga akhir Februari 2019 utang pemerintah sudah mencapai Rp 4.566,26 triliun. Jumlah ini meningkat sebesar Rp 531,46 triliun dibandingkan

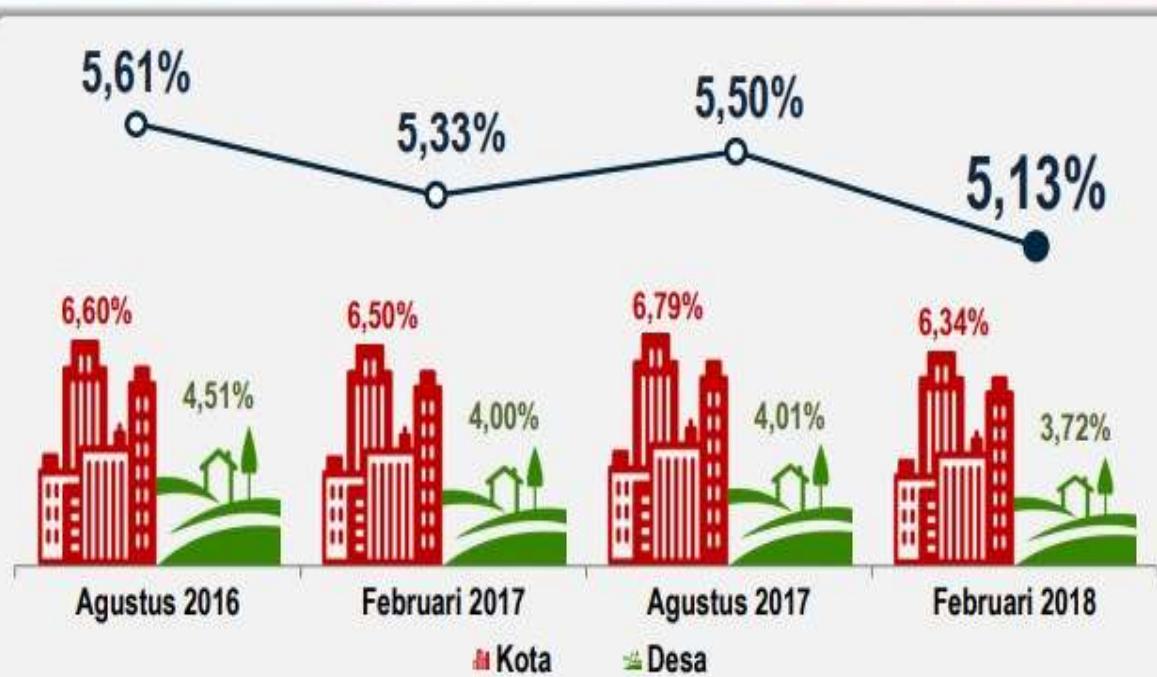
Iklan ditutup oleh Google

# PROFIL KEMISKINAN DI INDONESIA MARET 2018

Berita Resmi Statistik No. 57/07/Th. XXI, 16 Juli 2018



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Daerah,  
Agustus 2016 - Februari 2018



JOB

TPT PERKOTAAN LEBIH TINGGI DIBANDINGKAN  
TPT PERDESAAN

# Sudah makmurkah rakyat Indonesia?





Mengapa kekayaan yang dimiliki negara  
Indonesia belum bisa membuat rakyat  
Indonesia makmur?



# Dampak Perilaku dan Tindak Pidana Korupsi

## Dampak Ekonomi

- lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi
- penurunan produktifitas
- rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik
- menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak
- meningkatnya hutang negara

## Dampak Sosial dan Kemiskinan Masyarakat

- mahalnya harga jasa dan pelayanan publik
- pengentasan kemiskinan berjalan lambat
- terbatasnya akses bagi masyarakat miskin
- meningkatnya angka kriminalitas
- solidaritas sosial semakin langka dan demoralisasi

## Runtuhnya Otoritas Pemerintah

- matinya etika sosial politik
- tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan
- birokrasi tidak efisien

# Lanjutan...

## Dampak Terhadap Politik dan Demokrasi

- munculnya kepemimpinan korup
- hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi
- menguatnya plutokrasi
- hancurnya kedaulatan rakyat

## Dampak Terhadap Penegakan Hukum

- fungsi pemerintahan mandul
- hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara

## Dampak Terhadap Pertahanan dan Keamanan

- kerawanan hankamnas karena lemahnya alusista dan SDM
- lemahnya garis batas negara
- menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat

## Dampak Kerusakan Lingkungan

- menurunnya kualitas lingkungan
- menurunnya kualitas hidup

## Kajian Dampak Perilaku Korupsi

### *Kajian*

1.	Negara Korup harus membayar biaya hutang yang lebih besar ( Depken and Lafountan, 2006 )
2.	Harga Infrastruktur lebih tinggi ( Golden and Picci, 2005 )
3.	Tingkat Korupsi yang tinggi meningkatkan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan (Gupta, Davoodi and Alonso-Terme, 2002 )
4.	Korupsi menurunkan investasi (Paolo Mauro, 1995)
5.	Persepsi Korupsi memiliki dampak yang kuat dan negatif terhadap arus investasi asing (Shang, ADB)
6.	Negara-negara yang dianggap memiliki tingkat korupsi yang relatif rendah selalu menarik investasi lebih banyak daripada negara rentan korupsi (Campos dan Pradhan, ADB)

Kerusakan hutan dan lingkungannya
Bangunan yang cepat rusak
Penegakkan Hukum yang tidak adil
Pelayanan Publik yang buruk
Peredaran Narkoba
Sumber Daya Alam melimpah Rakyat tetap sengsara, dll. Fenomena yang terjadi



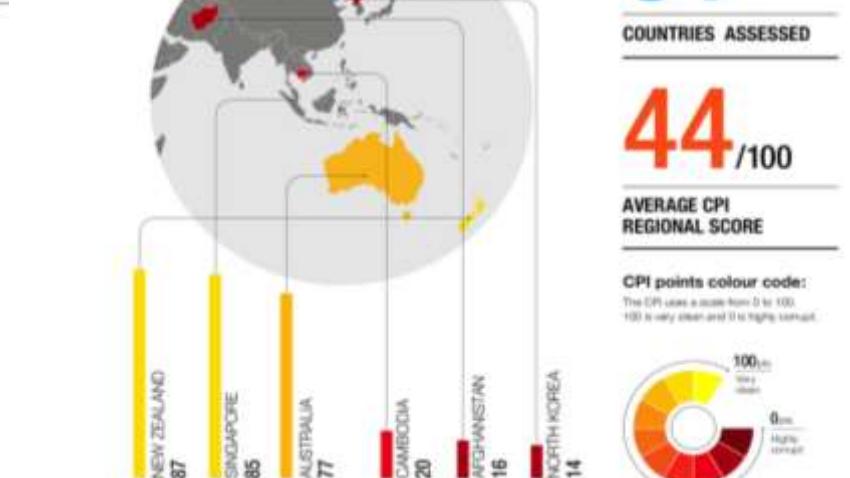
**TRANSPARENCY  
INTERNATIONAL**  
the global coalition against corruption

[HOME](#)

[WHO WE ARE](#)

[W](#)

# CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2018



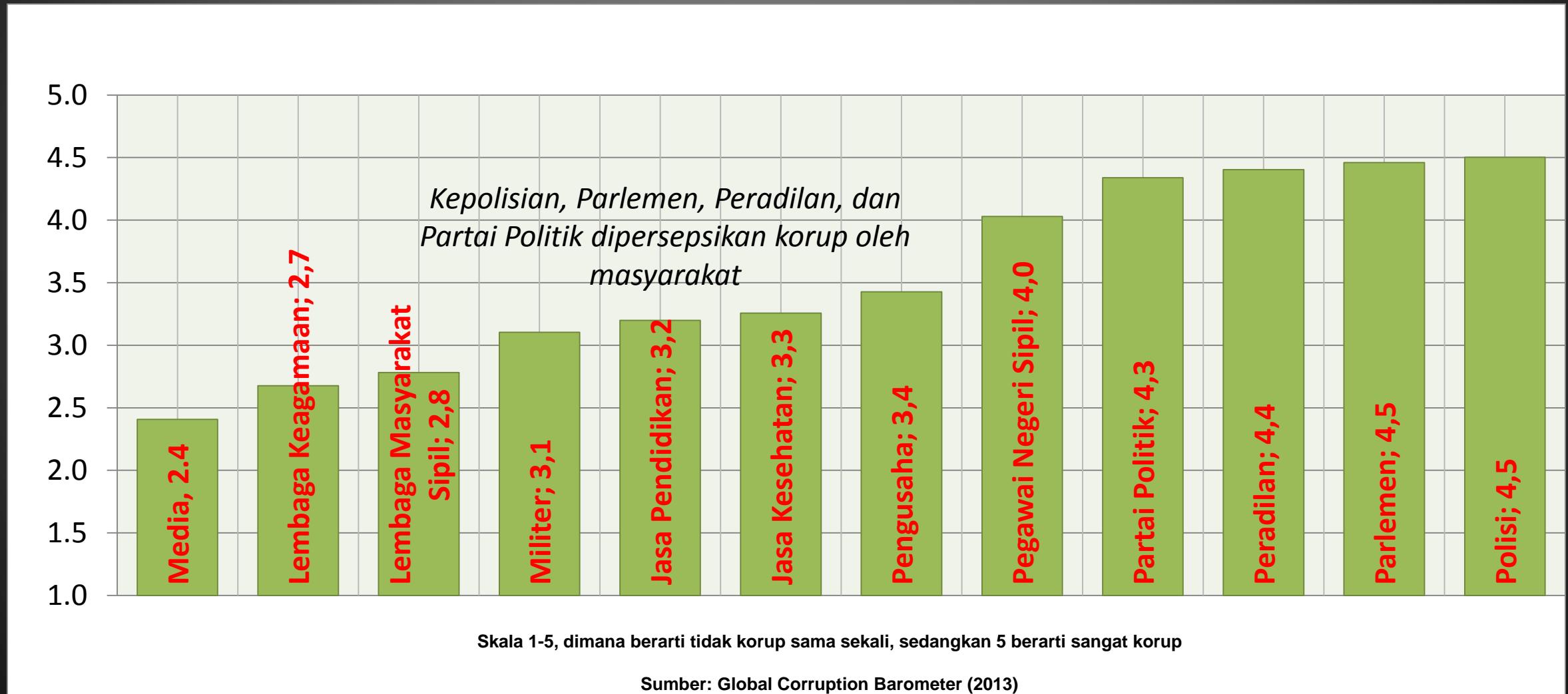
#	country	region	2018	2017	2016	2015
78	Kuwait	Middle East & North Africa	41	39	41	49
78	Lesotho	Sub-Saharan Africa	41	42	39	44
78	Trinidad and Tobago	Americas	41	41	35	39
78	Turkey	Eastern Europe & Central Asia	41	40	41	42
85	Argentina	Americas	40	39	36	32
85	Benin	Sub-Saharan Africa	40	39	36	37
87	China	Asia Pacific	39	41	40	37
87	Serbia	Eastern Europe & Central Asia	39	41	42	40
89	Bosnia and Herzegovina	Eastern Europe & Central Asia	38	38	39	38
89	Indonesia	Asia Pacific	38	37	37	36
89	Sri Lanka	Asia Pacific	38	38	36	37



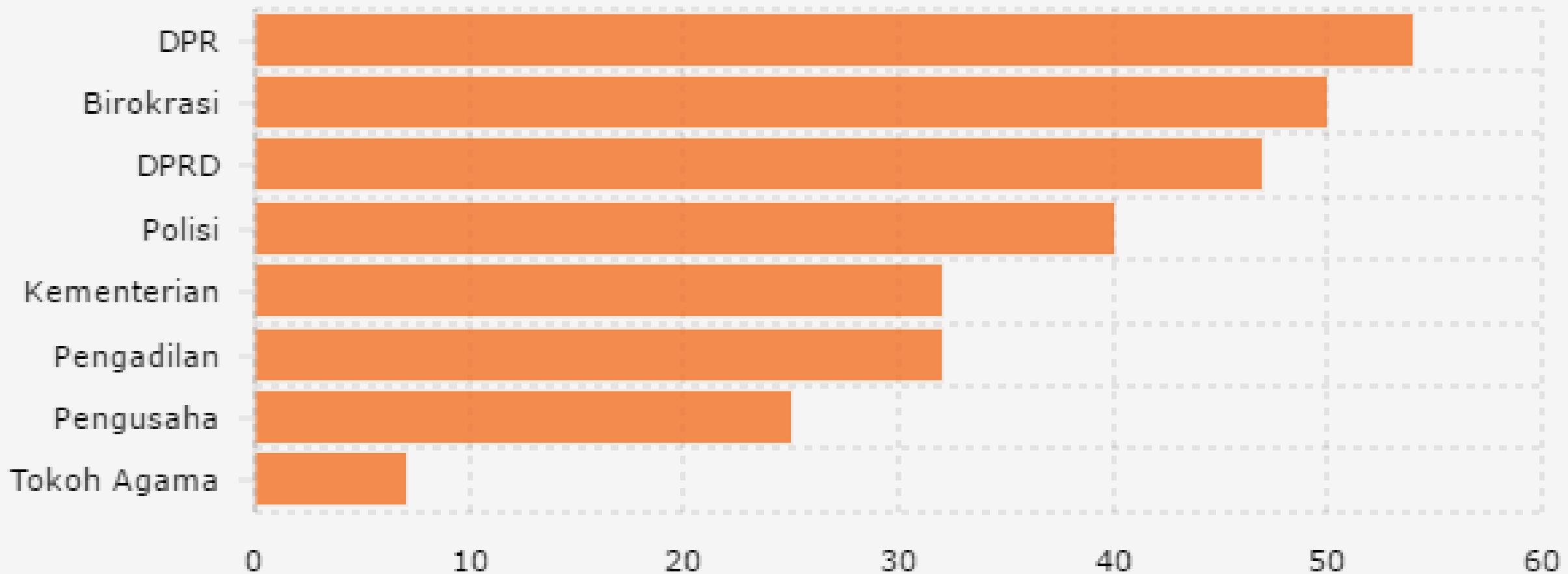
SURVEYS • 29 JANUARY 2019

**ASIA PACIFIC: LITTLE TO NO PROGRESS  
ON ANTI-CORRUPTION**

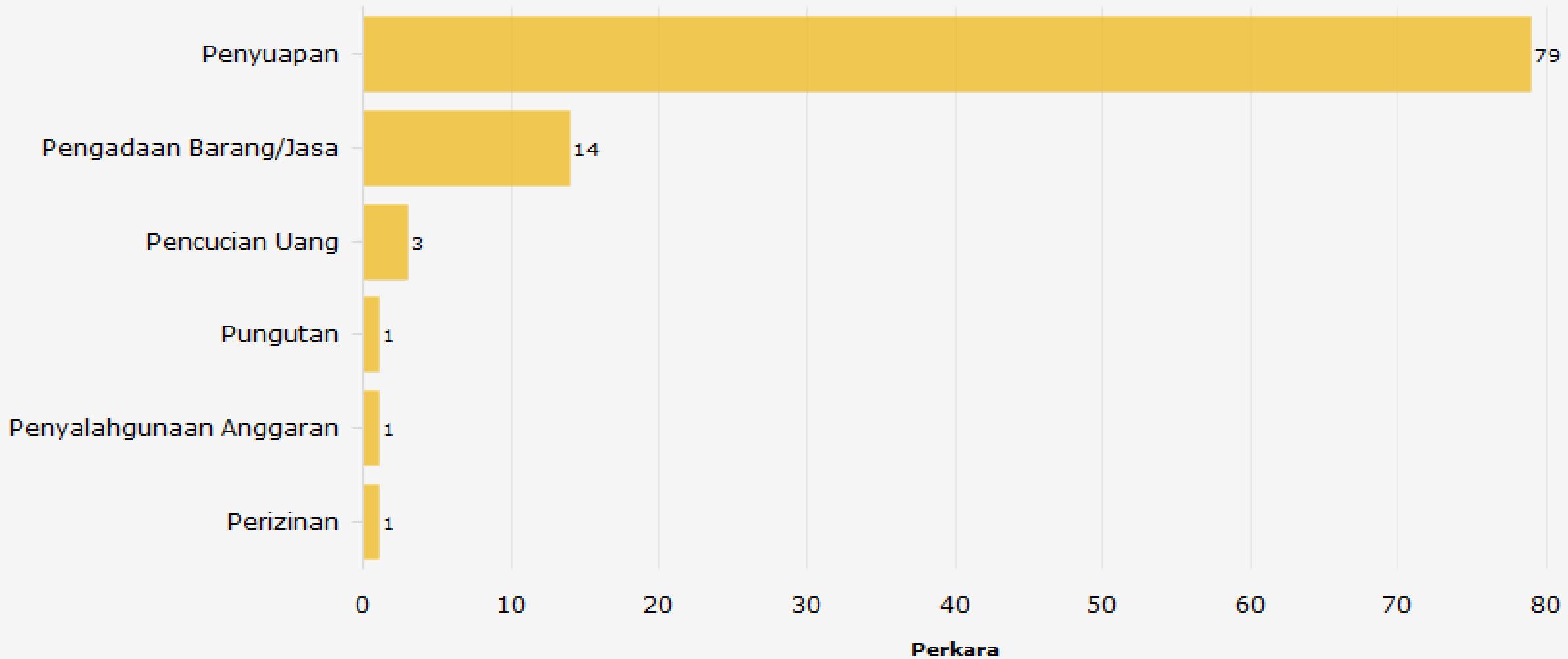
# Problem korupsi Indonesia: korupsi birokrasi dan politik



# Survei Persepsi Lembaga Paling Korup oleh Transparency International pada 2017



## Jumlah Perkara Korupsi yang Ditangani KPK pada 2016 Berdasarkan Modus



# INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2015 MENURUN

Untuk kali keempat, BPS merilis Indeks Perilaku Anti Korupsi 2015 di Gedung 3 lantai 1 BPS (22/2). Dalam survei yang melibatkan sampel 10.000 rumah tangga di 34 provinsi dan 170 kabupaten/kota di Indonesia pada November 2015 ini menghasilkan indeks sebesar 3,59 atau lebih rendah 0,02 poin dibandingkan dengan IPAK 2014 sebesar 3,61. "Nilai indeks yang semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin antikorupsi. Sebaliknya nilai indeks yang semakin mendekati 0 menunjukkan masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi," jelas Suryamin, Kepala BPS.

Hadir dalam acara tersebut Deputi Bidang Statistik Sosial, M.Sairi; Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan; Direktur Analisa Perundang-undangan Bappenas, Diani Sadiawati; dan *Country Manager* United Nation Office on Drugs and Crime, Collie Brown. Sementara Ketua KPK, Agus Rahardjo yang awalnya dijadwalkan hadir, batal datang karena adanya pembahasan amandemen UU KPK di hari yang sama.

Lebih lanjut, Suryamin mengatakan IPAK disusun berdasarkan dua dimensi utama, yakni persepsi dan pengalaman. Indeks persepsi cenderung meningkat sejak 2013 ke 2015, sebaliknya indeks pengalaman cenderung menurun. Kondisi tersebut menggambarkan masyarakat semakin idealis "membenci korupsi", tetapi tidak sejalan dengan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Terhadap dua dimensi ini Pahala menanggapi, "KPK tidak terlalu mempersalahkan terjadinya penurunan dalam IPAK 2015. Justru survei ini sangat



Deputi Bidang Statistik Sosial (kanan) berbincang dengan Deputi Pencegahan KPK (kedua dari kiri) Pahala Nainggolan

bermanfaat karena dilakukan secara kuantitatif dan berdasarkan fakta di lapangan. Dari dimensi persepsi saya pikir teman-teman media sudah cukup berhasil menginfokan ke masyarakat dalam membentuk pengetahuan anti korupsi. Akan tetapi tidak demikian faktanya di lapangan. Masih banyak praktik korupsi ditemui di pelayanan publik. Oleh karenanya survei ini sangat membantu KPK untuk mendukung diwujudkannya pelayanan terpadu satu pintu," tutur Pahala di akhir konferensi pers.

■ V2



Korupsi bagaikan BOM waktu yang dapat meledak kapan saja dan menghancurkan bangsa ini



by: udin samsudin.jkt  


KORUPSI BAGAIKAN  
BOM WAKTU

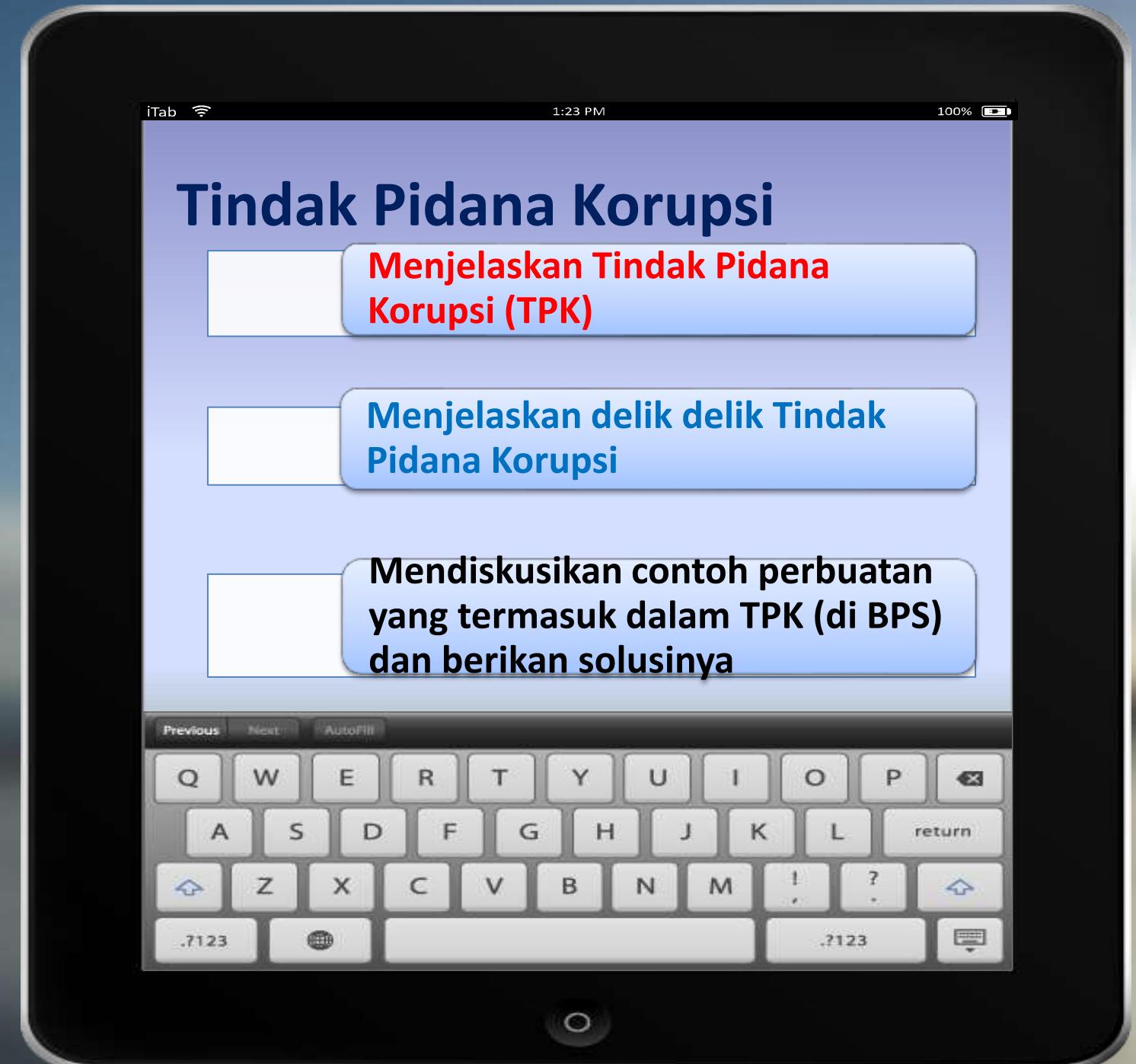


## COMBATING CORRUPTION



THE MISSION CONTINUES .....







**DASAR HUKUM PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI**



## • Dasar Hukum



- United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa menentang Korupsi, 2003);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

## DASAR HUKUM

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
- Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;

# Dagang Pengaruh Mesti Dijadikan Delik Hukum

DENGAN adanya pola tindak pidana korupsi baru, yakni mendagangkan pengaruh yang diduga melibatkan mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman, sejumlah pihak mendesak adanya perubahan perangkat regulasi anti-korupsi. Dagang pengaruh mesti dimasukkan sebagai delik hukum.

Hal itu disampaikan Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting, kemarin. Menurutnya, hingga saat ini hukum positif Indonesia belum mengakomodasi ketentuan mengenai mendagangkan pengaruh. Namun, ketentuan mendagangkan pengaruh sudah terdapat dalam Pasal 18 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Miko lebih lanjut mengatakan, meskipun Indonesia sudah meratifikasi UNCAC dengan UU No 7 Tahun 2006, masih disyaratkan untuk dibentuk ketentuan khusus guna mengimplementasikan delik mendagangkan pengaruh. Dasar jalannya proses peradilan pidana bagi seseorang ialah hanya apa yang sudah terteta dalam undang-undang.

"Karena itu, pemerintah dan DPR seharusnya segera membahas ketentuan mendagangkan pengaruh untuk diakomodasi dalam hukum positif. Agar kasus dengan pola serupa di kemudian hari dapat diberat dengan delik mendagangkan pengaruh," tukasnya.

Namun, meski hal itu belum diatur dalam UU, Miko mendesak KPK mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat dalam perkara suap kuota gula impor yang menyeret Irman Gusman, komisaris MNC Group, yang telah ditetapkan sebagai tersangka. "Tuntas dalam arti KPK harus mampu membongkar semua aktor, pola, dan jaringan dalam kasus ini," tukasnya.

KPK membidik oknum Bulog pada perkara

"Pemerintah dan DPR seharusnya segera membahas ketentuan mendagangkan pengaruh untuk diakomodasi dalam hukum positif."

**Miko Ginting**

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia

dugaan suap yang melibatkan Irman. "Ini bergantung pada hasil dari pengembangan. Kalau ada buktinya yang mengarah ke sana (keberlibatan oknum Bulog) kita pasti akan melakukan penyelidikan dan penyidikan," terang Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, di Gedung DPR, kemarin.

Syarif hanya mengatakan bahwa KPK sudah mendapatkan informasi bahwa Irman sempat menghubungi Kepala Bulog Djarot Kusumayakti terkait kuota gula impor. "Salah satunya ada rekomendasi."

Menurutnya, KPK akan mengembangkan perkara ini dengan dasar bukti yang nantinya didapat dalam proses penyidikan perkara yang telah menjerat Irman. Itu termasuk mendalami pemberian lain Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto dan istrinya. Memi, kepada Irman senilai Rp100 juta. "Itu juga sedang kami dalami," ujarnya.

Pada kesempatan terpisah, Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan bahwa pihaknya tidak menargetkan Irman dalam operasi tangkap tangan di rumah dinasnya di Jakarta (17/9). "Selalu dari awal laporannya dari masyarakat. Itu juga tidak ditelan begitu saja, selalu kita analisis," terangnya di Gedung DPR. (Cah/X-S)

# KLIPING



## LARANGAN GRATIFIKASI TERKAIT PERAYAAN HARI RAYA

Dalam suasana menjelang perayaan hari raya, KPK mengajak seluruh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha untuk memahami sebagai berikut:

1. KPK mengajukan terima kasih atas dukungan dari seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih baik dan bebas dari korupsi, terutama dari dunia usaha dan masyarakat untuk turut serta menjaga integritas Pejabat Publik, Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara;
2. Bahwa terjadi kecenderungan meningkatnya kebutuhan dan pengeluaran menjelang perayaan hari raya yang dapat meningkatkan risiko terjadinya penerimaan gratifikasi dan relaksasi penggunaan fasilitas masyarakat yang umumnya berkaitan dengan jabatan, tugas dan tanggung jawab Pejabat Publik, Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara sebagai pihak yang potensial menerima gratifikasi;
3. Bahwa berdasarkan informasi pemantauan masyarakat dan hasil pemantauan kami di lapangan, terdapat sejumlah permintaan dana dan/atau hadiah untuk Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain oleh sejumlah pejabat publik, Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara kepada masyarakat dan/atau pemantauan, baik secara lisan maupun tertulis. Hal ini pada prinsipnya dilakukan karena merupakan pernyataan wewenang yang menyusun ke arah Tindak Pidana Korupsi (TPK), dapat menimbulkan benturan kepentingan dan menurunkan kepercayaan masyarakat;
4. Terkait dengan kebiasaan menjelang hari besar keagamaan dan perayaan lainnya, pemberian gratifikasi kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara tersebut terkaitnya baik berupa uang, bingkisan/pesanan, fasilitas ataupun pemberian lainnya yang bertubuhnya dengan jabatan dan berlawanan dengan kebijakan atau tujuanya, pada prinsipnya pemberian gratifikasi semacam ini wajib ditolak namun apabila diterima secara tidak langsung atau tidak direstui perintah pemberiannya, wajib dilaporkan kepada KPK pada jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima atau melalui unit Pengaduan Gratifikasi (UPG) di institusi masing-masing paling lambat 7 (tujuh) hari kerja selepas diterima;



5. Kepada setiap pimpinan instansi atau lembaga pemerintah agar melarang penggunaan fasilitas dinas seperti kendaraan operasional dimas diantara pegawai untuk kepentingan pribadi seperti untuk kegiatan mudik, mengingat fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kebutuhan dan merupakan bentuk benturan kepentingan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Pejabat Publik, Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara;
6. Kepada Satuan Pengawas Internal atau UPG pada setiap instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD diharapkan melakukan pemantauan, penilaian dan mengidentifikasi pelakunya penerimaan gratifikasi maupun penggunaan kendaraan dinas diantara pegawai di lingkungan kerjanya. Selanjutnya penerimaan gratifikasi tersebut segera dilaporkan ke KPK seimbang-lembatnya 30 (tiga puluh) hari kerja;
7. Kepada Asosiasi/Gabungan/Himpunan Perusahaan Swasta agar dapat memerintahkan anggotanya di lingkungan masing-masing untuk tidak memberikan sebutu dalam bentuk apapun terkait Perayaan Hari Raya kepada Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kebijakan atau tujuan. Apabila dalam kondisi tertentu terpaksa memberikan misal. gratifikasi atau uang pelicit, agar melaporkan kepada KPK pada kesempatan pertama.

Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di [www.kpk.go.id/gratifikasi](http://www.kpk.go.id/gratifikasi) atau email ke [pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id](mailto:pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id) atau dengan mengakses web pelaporan gratifikasi online di <https://gol.kpk.go.id> atau menghubungi nomor telepon 0800-81-000000, 0800-81-000001.

Pimpinan KPK beserta jajaran mengucapkan selamat hari raya, semoga Allah SWT memberikan幸福和平安 dan senantiasa memberikan berkah, amanah, dan perlindungan di setiap langkah kita.

Mohon maaf lahir dan batin



# Pengertian Korupsi

Korupsi adalah diskresi dan monopolii tanpa adanya akuntabilitas

$$K = D + M - A$$

*K*orupsi

*D*iskresi

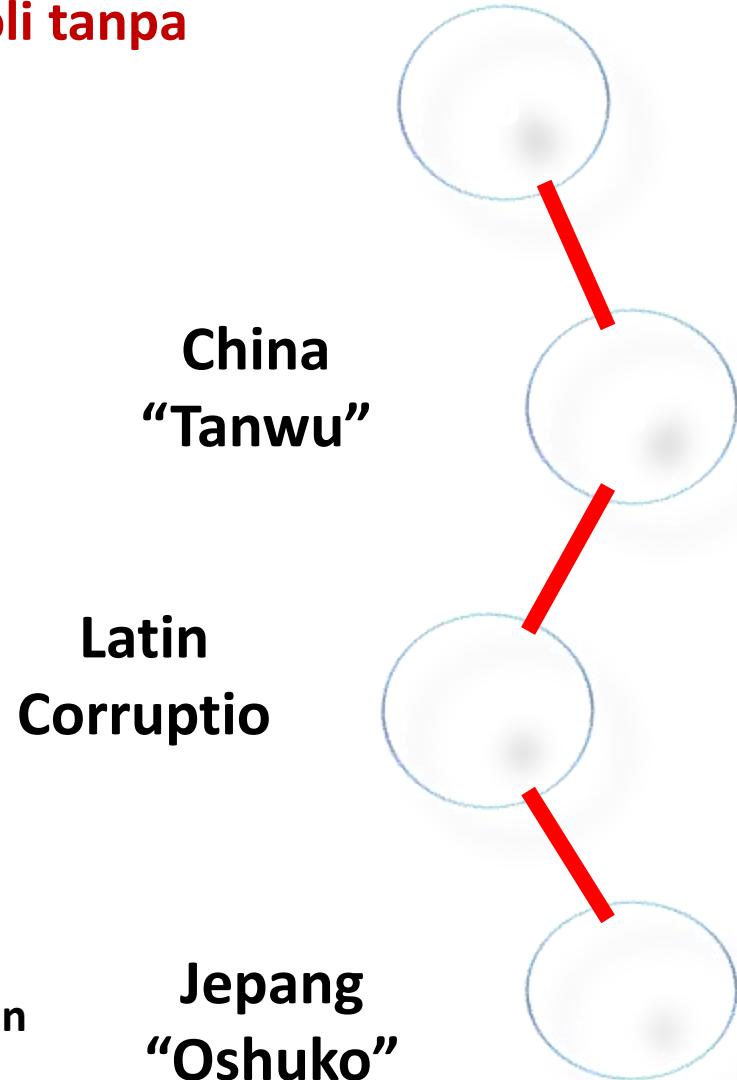
*M*onopoli

*A*kuntabilitas

Diskresi (KBBI) = kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi

Monopoli (KBBI) = hak tunggal untuk berusaha (membuat dan sebagainya)

Akuntabilitas (wikipedia) = pertanggungjawaban tehadap tiap tindakan



**Muangthai  
“Gin Moung”**

Lingkaran dengan kode yang menunjukkan arti dari berbagai istilah korupsi :

- a. Kerusakan atau kebobrokan
- b. Makan Bangsa
- c. Kerja Kotor
- d. Keserakahan Bernoda



# Peta Korupsi

1. Penyelewengan dari target → Audit Perencanaan
2. Pemerasan kepada wajib pajak  
→ Transparansi & akuntabilitas sistem pajak
3. Manipulasi data → Perbaikan sistem
4. Terjadi COI → Inisiasi UU COI

1. Penyalahgunaan perizinan  
→ Perbaikan sistem kewenangan
2. Tidak ada single data base  
→ Integrated database
3. Penyelewengan penyetoran  
→ Perbaikan sistem penerimaan

1. Penyimpangan prosedur pengadaan  
→ Mendorong eproc, pembentukan ULP, penetapan HPS, pengaturan COI, Whistleblower system, transparansi dan akuntabilitas sistem pengadaan.



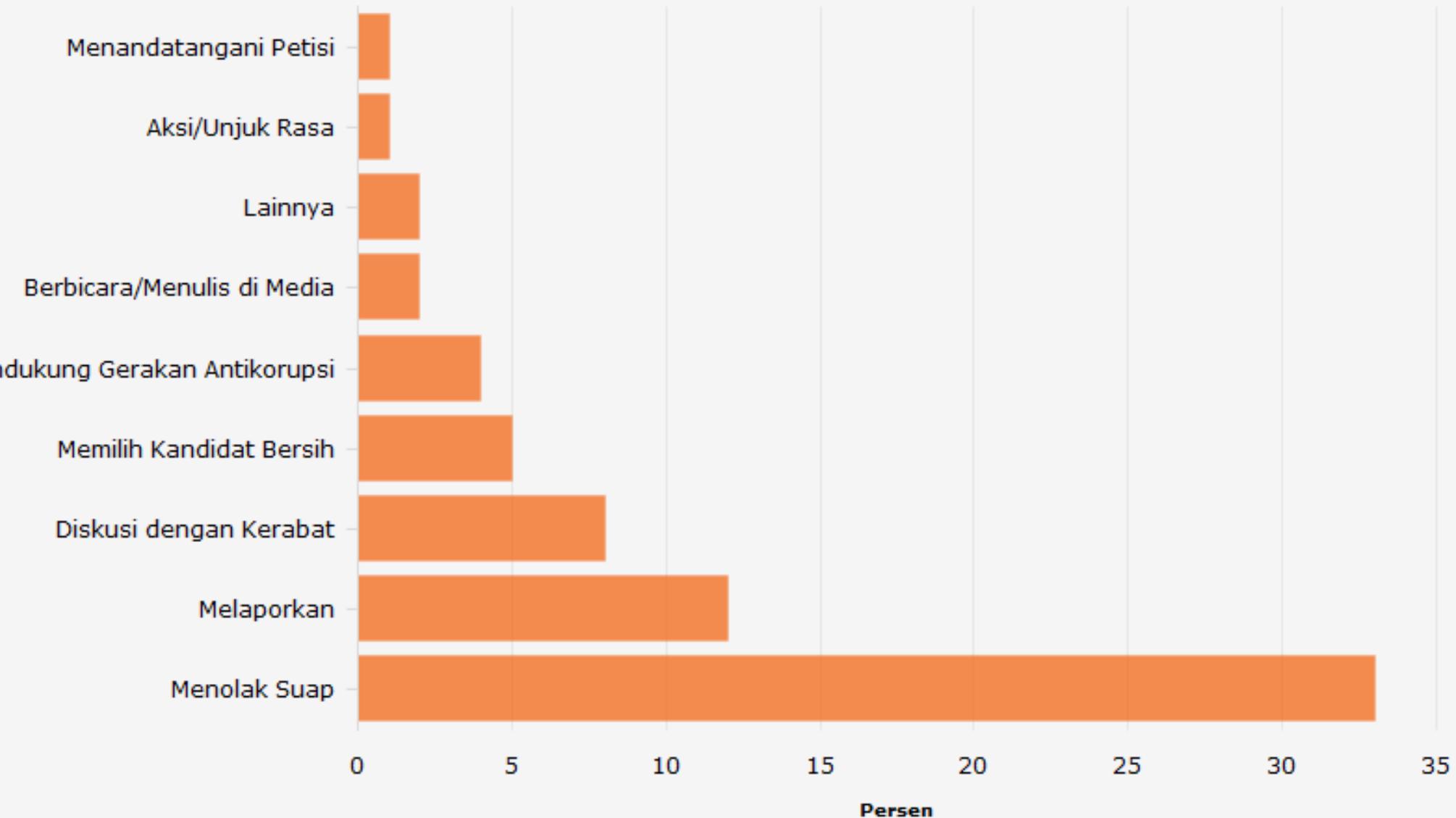
1. Masuk pada APBD:  
Penyalahgunaan wewenang, penggelapan
2. Pelaporan tidak standar
3. Alokasi penggunaan tidak transparan  
→ Perbaikan sistem

1. PERDA tak mengacu pada perUU – penertiban Perda
2. Penghasilan aparat – penindakan

1. Penyimpangan peruntukan
2. Penggelapan
3. Fiktif  
→ Perbaikan sistem penganggaran, Penguatan pengawasan DPR

# Bagaimana Upaya untuk Memberantas Korupsi?

Survei Upaya Warga di Indonesia Untuk Melawan Korupsi oleh Transparency International



D

## Niat, Semangat & Komitmen Anti Korupsi

SPIRITUAL

ACCOUNTABILITY yang baik  
akan menimbulkan Niat Baik





## INDONESIA BEBAS DARI KORUPSI



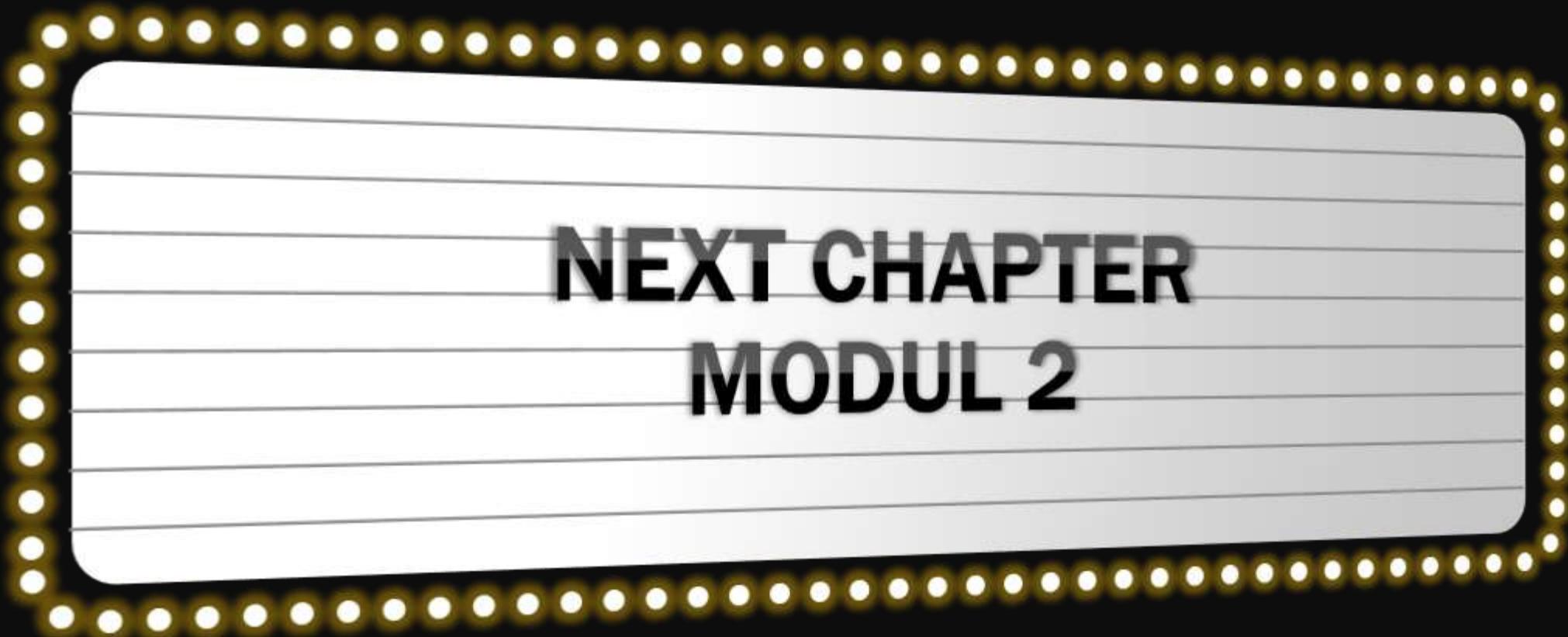
**SIN : Sistem Integritas Nasional** adalah inisiatif KPK untuk mencegah korupsi secara terintegrasi yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan nasional

**Dreamtegrity : Impian Indonesia Berintegritas**

# Niat, Semangat & Komitmen Anti Korupsi



1. Memutar Film "Integrasi(kan) Integritas"
2. Berikan kesimpulan dari Film "Integrasikan Integritas" tersebut.
3. Apa kaitannya Film tersebut dengan Niat, Semangat dan Komitmen Anti Korupsi?
4. Upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi sudah dilakukan tetapi korupsi masih tetap jalan terus, korupsi bahkan terjadi pada lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Mengapa korupsi masih terus berjalan? Langkah apa yg perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut?



**NEXT CHAPTER  
MODUL 2**



# Tujuan Pembelajaran

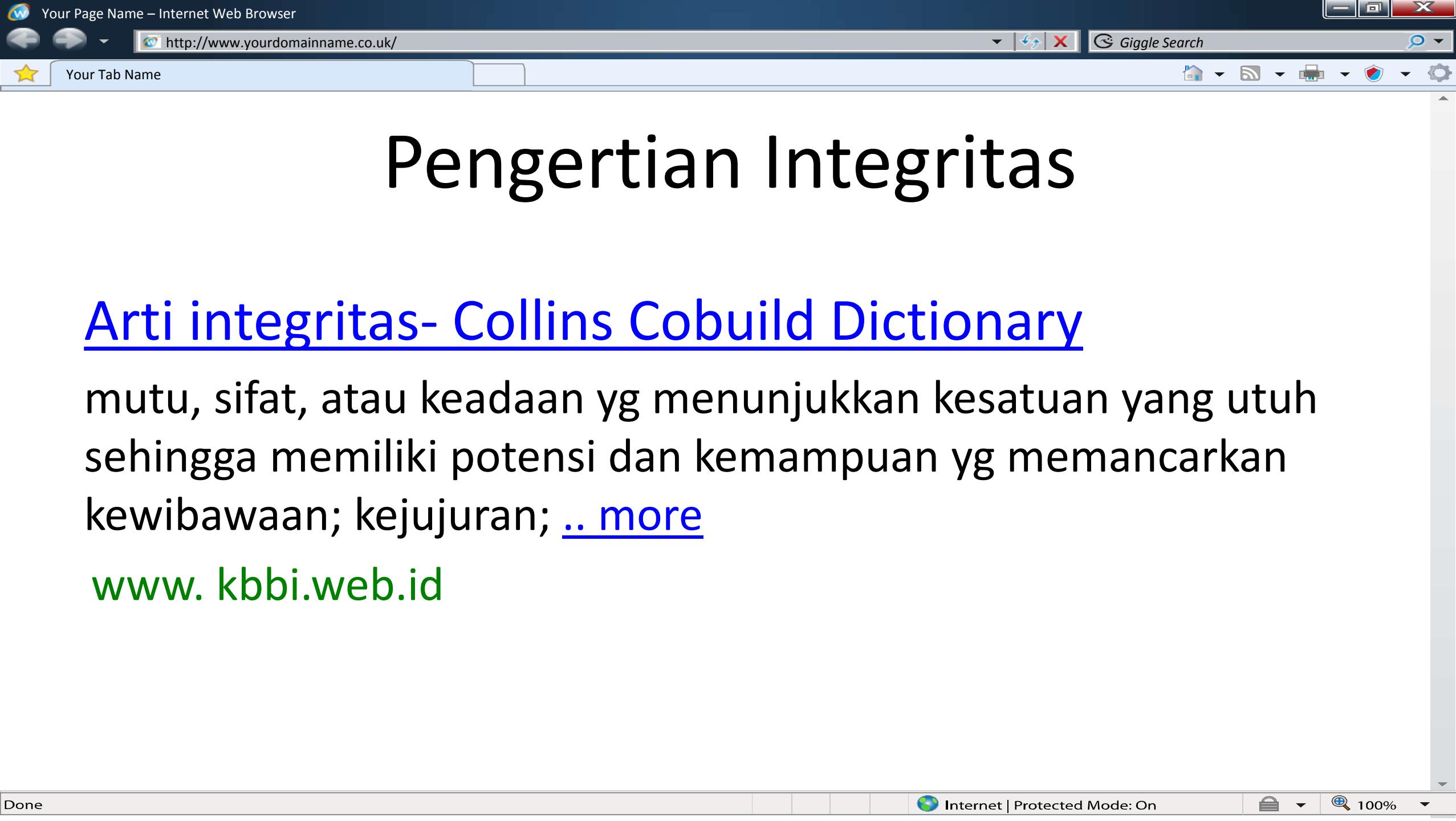
Setelah mempelajari modul ini, diharapkan Anda mampu memiliki pemahaman yang jelas dan contoh nyata cara menghindarkan diri dari perilaku dan tindak pidana korupsi, Secara lebih khusus, Anda diharapkan dapat :

1. Menjelaskan peran tunas integritas dalam pemberantasan korupsi
2. Menentukan nilai nilai dasar anti korupsi yang paling signifikan bagi Anda dan instansi tempat Anda akan bekerja
3. Memiliki teknik sederhana dalam internalisasi integritas sebagai salah satu upaya untuk menghindari korupsi
4. Melakukan re-framing untuk memudahkan proses internalisasi integritas
5. Memahami seeding dan perilaku otomatis dalam konteks perilaku anti korupsi
6. Menjelaskan peran sistem integritas organisasi untuk menjaga individu berintegritas



# Tunas Integritas



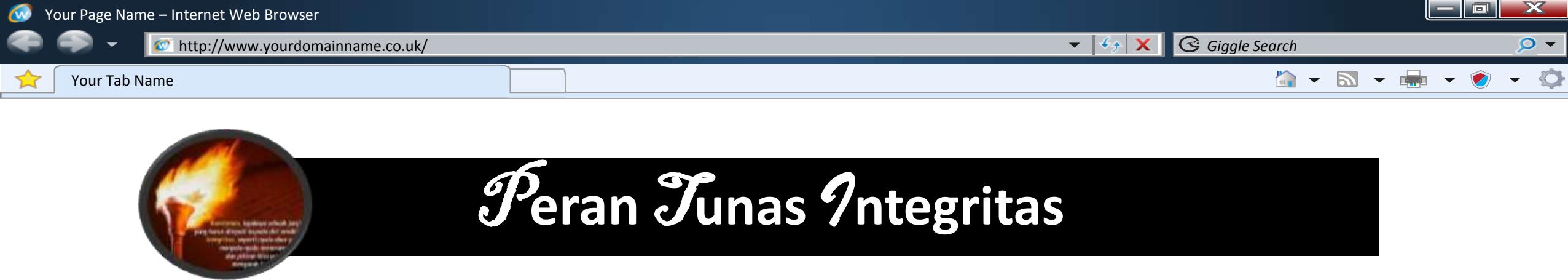


# Pengertian Integritas

## Arti integritas- Collins Cobuild Dictionary

mutu, sifat, atau keadaan yg menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yg memancarkan kewibawaan; kejujuran; [.. more](#)

[www. kbbi.web.id](http://www. kbbi.web.id)



Tunas Integritas diharapkan dapat menjalankan peran strategis dalam organisasi berupa:



1. Menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi, mereka menjadi kumpulan orang yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai.
2. Membangun sistem integritas, berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya tidak terjadi.
3. Mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja untuk berintegritas tinggi



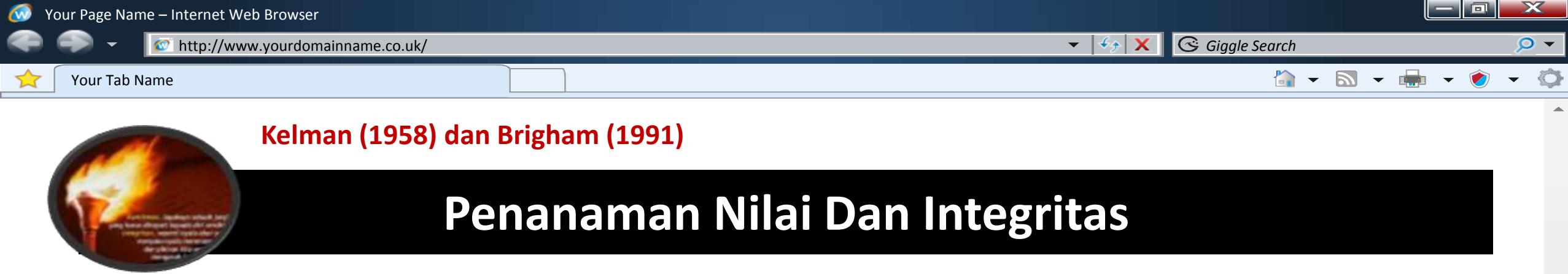
# Jaya Tunas Integritas

## Konsep diri sebagai seorang tunas integritas



- **Membangun sistem yang kondusif**
- **Menyelaraskan antara rohani dan jasmani**

Penyelarasan pada semua elemen dirinya (jiwa, pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan) dengan nurani (standar kebaikan universal), sehingga terbentuk perilaku integritas yang selaras pula dengan berbagai situasi dan lingkungan (sistem dan budaya integritas)



Kelman (1958) dan Brigham (1991)

## Penanaman Nilai Dan Integritas

Tiga proses sosial yang berperan dalam proses perubahan sikap dan perilaku, Yaitu :



- Kesediaan (Compilience)
- Identifikasi (Identifikation)
- Internalisasi ( Internalization)

### Integritas

- sebagai suatu proses sosial yang ditujukan untuk mengatasi korupsi di Indonesia, dengan demikian salah satu upaya perubahannya dapat dilakukan melalui tiga proses perubahan sosial dari Kelman dan Brigham tersebut



# Penanaman Nilai Dan Integritas

## Kesediaan

Kesediaan terhadap integritas (Integrity Compliance) adalah ketika individu bersedia menerima pengaruh untuk berintegritas dari orang lain atau dari kelompok lain, dikarenakan ia berharap untuk memperoleh reaksi atau tanggapan positif dari pihak lain tersebut.

*Alam bawah sadar, ibarat lautan luas  
di sekeliling pulau kecil kesadaran*





## Penanaman Nilai dan Integritas

Teknik lainnya

**S**imbolisasi

**D**is Asosiasi

**M**ulti Protection

**C**hange belief



# Identifikasi Nilai Dasar Anti Korupsi



PIKIRAN MANUSIA  
SESUNGGUHNYA MEMILIKI  
KEMAMPUAN TAK  
BERBATAS, KECUALI BAGI  
MEREKA YANG  
MENGANGGAPNYA  
TERBATAS. KAYA ATAU  
MISKIN TAK LAIN ADALAH  
BUAH DARI PIKIRAN  
ANDA SENDIRI

- 1) jujur**
- 2) peduli**
- 3) mandiri**
- 4) disiplin**
- 5) tanggung jawab**
- 6) kerja keras**
- 7) sederhana**
- 8) berani**
- 9) adil**



# Penyelarasan Nilai Organisasi Dan Nilai Anti Korupsi

## Tugas Kelompok



- Nilai-nilai Dasar Organisasi Anda ? Selaraskah dengan nilai anti korupsi ?
- Lakukan pengecekan bahwa visi dan misi tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal, sehingga proses penyelarasan nilai yang dilakukan adalah memastikan bahwa nilai-nilai yang dipilih mempunyai signifikansi atau hubungan yang sangat kuat

## Contoh tabel penyelarasan nilai organisasi

Nilai	Data	Data	Data	Data	Data	DST	Rata-Rata
Nilai X	1	2	3	4	5		
Nilai Y	3	2	3	3	3	3	2,9
Nilai Z	3	1	2	2	2	2	2,4
DST							

Hasil kegiatan di atas akan menjadi penting bagi penentuan prioritas dan alokasi waktu dan sumber daya dalam melakukan internalisasi nilai-nilai. Besaran angka dari setiap nilai dapat diutilisasi untuk berbagai kepentingan atau kebijakan yang mempunyai keterkaitan dengan nilai-nilai organisasi.



# Proses Internalisasi Integritas

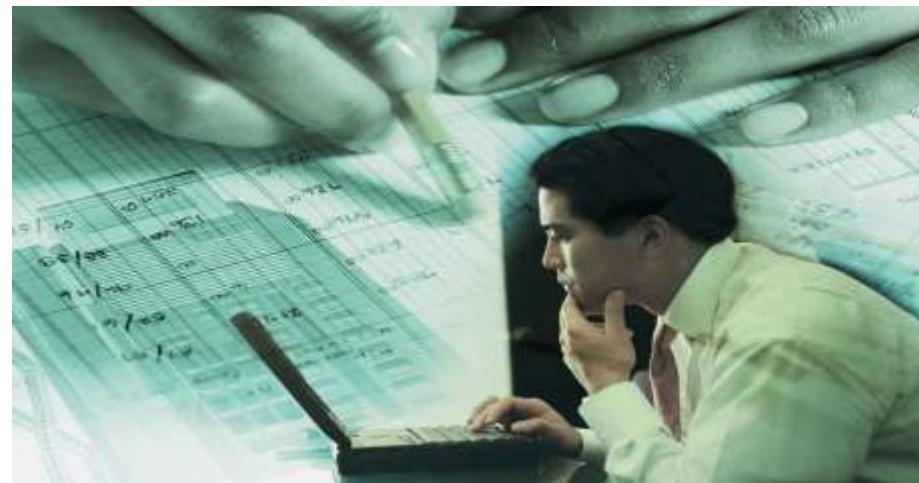


**Pemahaman tentang pentingnya internalisasi integritas yang lebih permanen bertahan dalam diri seseorang, membuat Anda mempunyai keinginan kuat untuk mempelajari beragam teknik yang diperlukan untuk melakukan internalisasi integritas.**



# Proses Internalisasi Integritas

Pemahaman Anda yang bertambah tentang bawah sadar dan kemampuan luar biasa manusia, semakin membuat Anda yakin bahwa Internalisasi bisa dijadikan kerangka perubahan integritas diri dan masyarakat yang efektif





# Proses Internalisasi Integritas

internalisasi integritas akan maksimal ketika kita mampu menggabungkan pendekatan inside out dan out side in. Untuk terjadinya hal tersebut maka:

1. Perbanyak hidup dalam lingkungan yang positif
2. Pastikan pengaruh lingkungan yang negatif tidak masuk dalam pikiran (diri)
3. Segera lakukan teknik perubahan sistem nilai
4. Agar yang negatif dapat dihapuskan dan diganti dengan yang positif!





# Proses Internalisasi Integritas

**MAS AURA**

**7 Kompetensi Dasar Internalisasi**

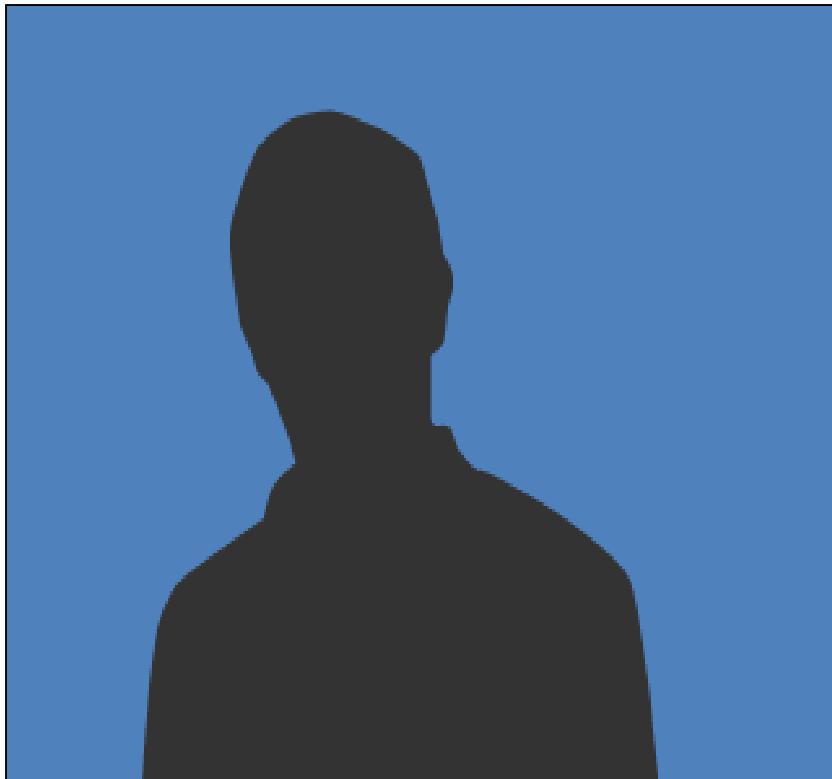
- 1. Modality
- 2. Asosiasi
- 3. Sugesti
- 4. Anchoring
- 5. Utilisasi
- 6. Rileksasi
- 7. Amplify

# KOMPETENSI

www.dailynews.com

THE WORLD'S FAVOURITE NEWSPAPER

- Since 1879



## MAS AURA

Modality ..... Bagaimana Sesuatu dilakukan

Asosiasi..... tautan di ingatan pd orang atau barang lain; pembentukan hubungan atau pertalian antara gagasan, ingatan, atau kegiatan pancaindra

Sugesti..... pendapat yg dikemukakan (untuk dipertimbangkan); anjuran; saran; pengaruh dsb yg dapat menggerakkan hati orang dsb; dorongan

Anchoring..... Melabuhkan memory positif

Utilisasi..... Sinergi

Rileksasi.....

Amplify..... Memperkuat ( menyatukan )

パン・ナガネ子供映画  
北欧アイスクラーム  
田道製菓

MOVIE TIME

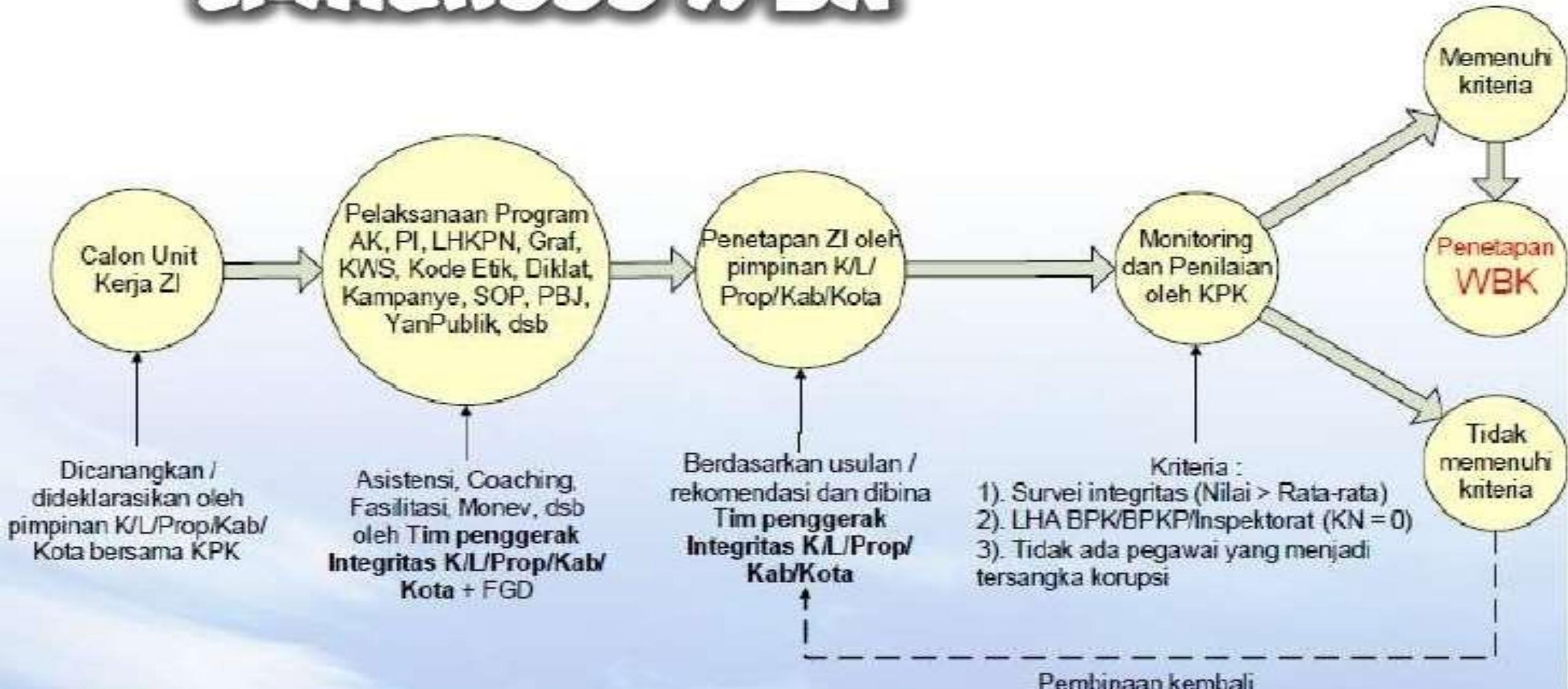
WHAT is  
SISTEM INTEGRITAS

## C. SISTEM INTEGRITAS ORGANISASI

---



# ZI MENUJU WBK



(Dalam : Tri Widodo W. Utomo, Etika & Pembangunan Integritas Aparatur, ppt)

# **INDIKATOR MUTLAK WBK**

- **Indikator Mutlak pada tingkat K/L/Pemda** adalah Opini Keuangan BPK sekurang-kurangnya WDP pada saat pengajuan calon WBK .
- **Indikator Mutlak pada tingkat Unit/Satuan Kerja:**
  - nilai minimum indeks integritas berdasarkan penilaian KPK;
  - nilai minimum indeks kepuasan masyarakat berdasarkan penilaian Kementerian PAN dan RB;
  - jumlah maksimum kerugian negara (KN) yg belum diselesaikan (%) berdasarkan penilaian BPK;
  - jumlah maksimum temuan in-efisien (%) berdasarkan penilaian APIP;
  - persentase maksimum jumlah pegawai yg dijatuhi hukuman disiplin karena penyalahgunaan pengelolaan keuangan berdasarkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian;
  - persentase maksimum jumlah pengaduan masyarakat yg tidak diselesaikan berdasarkan hasil pemeriksaan APIP;
  - persentase maksimum jumlah pegawai yg dijatuhi hukuman karena tindak pidana korupsi berdasarkan keputusan pengadilan yg telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

# INDIKATOR UTAMA WBK (60%)

- Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas;
- LHKPN;
- Akuntabilitas Kinerja;
- Laporan Keuangan;
- Kode Etik;
- Sistem Perlindungan Pelapor (*whistle blower system*);
- Program Pengendalian Gratifikasi;
- Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan (*conflict of interest*);
- Program Inisiatif Anti Korupsi;
- Kebijakan Pembinaan Purna Tugas (*post employment policy*);
- Pelaporan Transaksi Keuangan yg Tidak Wajar oleh PPATK.

(Dalam : Tri Widodo W. Utomo, Etika & Pembangunan Integritas Aparatur, ppt)

## **INDIKATOR PENUNJANG WBK (40%)**

- Promosi Jabatan Secara Terbuka;
- Rekruitment Secara Terbuka;
- Mekanisme Pengaduan Masyarakat
- E-procurement;
- Pengukuran Kinerja Individu;
- Keterbukaan Informasi Publik.

# PEMBINAAN & PENGAWASAN WBK

- **Terhadap Unit Kerja** (untuk mempersempit kesempatan)
  - perbaikan sistem & prosedur;
  - perbaikan sarana;
  - penghargaan berupa percepatan kenaikan pangkat, renumerasi, dsb.
- **Terhadap Pegawai** (untuk meluruskan niat)
  - pelatihan Anti Korupsi dengan tujuan membangun Integritas PNS dengan metode yg efektif.

- **Pemantau independen** (ditunjuk oleh Panitia Seleksi – KemenPAN dan RB)
- **Masyarakat.**





# Tunas Integritas



## PENGERTIAN INTEGRITAS PNS

**“Integritas PNS” Diartikan Sebagai Pernyataan Atau Janji Kepada Diri Sendiri Sebagai Aparatur Pemerintah Tentang Komitmen Melaksanakan Seluruh Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab, Wewenang Dan Peran Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan Dan Kesanggupan Untuk Tidak Melakukan Korupsi.**

## Selesai Dengan Dirinya

Negeri ini membutuhkan orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya, ia tidak identik dengan orang kaya, karena tidak sedikit orang kaya pun terus mencari tambahan kekayaan, bahkan menambahnya lewat korupsi.



Berorientasi pengabdian  
kompeten  
bahagia

